



EXECUTIVE SUMMARY

DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018



EXECUTIVE SUMMARY

INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017

Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya Palembang merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang mempunyai luas wilayah 91,592.43 Km², yang terletak pada 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 13 (belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, seperti kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas perairan, kerusakan lingkungan di berbagai sektor dan meningkatnya timbulan sampah.

A. Isu Prioritas

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun.





Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 mencapai 9.286 Ha yang tersebar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 jika diurutkan dari yang paling banyak terjadi, yaitu :

1. Kabupaten Ogan Ilir seluas 2.614 Ha atau 28,15% dari luas lahan yang terbakar (2.614 Ha / 28,15%)
2. Kabupaten Muara Enim (2.430 Ha / 26,17%)
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (1.639 Ha / 17,65%)
4. Kabupaten OKU Timur (883 Ha / 9,51%)
5. Kabupaten Banyuasin (826 Ha / 8,90%)
6. Kabupaten Musi Banyuasin (360 Ha / 3,88%)
7. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (264 Ha / 2,84%)
8. Kabupaten Musi Rawas (123 Ha / 1,32%)
9. Kota Palembang (77 Ha / 0,83%)
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu (57 Ha / 0,61%)
11. Kota Prabumulih (12 Ha 0,13%)

Kebakaran hutan yang terjadi pada 11 (sebelas) kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 paling banyak terdapat di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) seluas 8537 Ha (91,93%) sedangkan pada kawasan hutan seluas 749 Ha (8,06%). Persentase luas lahan yang terbakar pada Tahun 2017

Kebakaran pada Tahun 2017 tidak terjadi pada wilayah hutan atau wilayah yang memiliki lahan gambut yang luas dan rentan terbakar seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, kebakaran banyak terjadi pada lahan areal penggunaan lain (APL).





Luas kebakaran hutan yang terjadi pada Tahun 2017 adalah 92% di areal penggunaan lain (APL). Persentase luas kebakaran hutan Tahun 2017 apabila dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016, maka kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada Tahun 2015. Dimana pada Tahun 2015 mencapai 722.887 Ha yang sebelumnya pada Tahun 2014 hanya seluas 274.051 Ha. Namun pada Tahun 2016, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan jauh berkurang menjadi 978,36 Ha atau hanya terjadi 0,13 % dari luas kebakaran hutan dan lahan pada Tahun 2015. Karhutbunlah pada Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 yakni mencapai 9.286 hektar

Pada Tahun 2014 Kabupaten PALI paling banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan (274.051 H), Kabupaten Ogan Komering Ilir (377.365 Ha), Tahun 2016 Kabupaten Musi Banyuasin (419,85 Ha) dan pada Tahun 2017 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (180 Ha).

Kawasan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas di Tahun 2016 dan 2017 yakni pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) berupa perkebunan dan pertanian rakyat. Sedangkan pada Tahun 2015, lahan yang terluas mengalami kebakaran yakni pada kawasan hutan produksi tetap, perkebunan dan hutan suaka alam.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari jumlah titik api (hotspot) yang terdapat di Sumatera Selatan. Pada Tahun 2017, jumlah hotspot yang terdapat di Sumatera Selatan Periode Januari sampai dengan Desember 2017 sebanyak 1.142 titik. Berdasarkan Gambar 3.30 dapat diketahui bahwa jumlah hotspot paling banyak terdapat pada bulan September yang berjumlah 418 titik dan pada bulan November dan Desember tidak ada titik api (hotspot). Titik api (hotspot) selama Tahun 2017 paling banyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 180 titik api (hotspot) dan paling sedikit di Kota Pagar Alam dengan 2 (dua) titik api (hotspot).

Jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 paling banyak terdapat pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 91,93 %, yang





kemudian diikuti oleh kawasan hutan produksi sebesar 7,19 %, sedangkan yang terdapat pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi masing-masing hanya sebesar 0,43 % dan 0,44 %.

Luasnya kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) disebabkan oleh banyaknya terdapat lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Data Puslitanak Kementan dan Wetland Internasional, secara umum luas areal bergambut di Sumatera Selatan seluas 1.474.177,08 Ha (16,09%) dari luas Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian besar sudah terdegradasi sehingga akan cepat kering dan sangat mudah terbakar pada musim kemarau serta berpotensi menimbulkan kabut asap

Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50-400 cm atau termasuk kategori dangkal hingga dalam. Namun demikian 96,8 % termasuk gambut dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 % atau 45.009 Ha merupakan gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir dan Panukal Abab Lematang Ilir. Sebaran dan luas kawasan gambut menurut kedalaman di Provinsi Sumatera Selatan

Apabila dibandingkan jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017, maka jumlah hotspot paling banyak terdapat pada Tahun 2015 yang berjumlah 27.043 titik. Tahun 2016 jauh berkurang menjadi 959 titik atau hanya 0,035 % dari jumlah hotspot pada Tahun 2015. Pada Tahun 2017 terjadi kenaikan hotspot dibandingkan dari Tahun 2016 yaitu 169 titik atau 13,37% dari jumlah hotspot Tahun 2016.

2. Restorasi Gambut

Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan gambut terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Luasnya meliputi 16,3 % (enam belas koma tiga persen) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan gambut tersebut tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 768.501 ha, Musi Banyuasin dengan luas gambut 340.604,48 ha, Banyuasin dengan luas 252.706,52 ha, Musi Rawas seluas 34.126,00 ha dan Muara Enim seluas 24.104,00 ha. Lahan gambut sangatlah penting artinya,





karena merupakan sistem penyangga kehidupan yang berfungsi sebagai sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, dan berfungsi sebagai pengendali iklim global. Disamping itu juga lahan gambut berperan di dalam menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan. Secara hidrologi, ekosistem lahan gambut sangat penting dalam sistem kawasan hilir suatu Daerah Aliran Sungai karena kemampuannya menyerap air sampai dengan 13 (tiga belas) kali bobotnya.

Saat ini lahan gambut telah dikelola dalam berbagai pola oleh banyak pihak, termasuk pihak swasta maupun pihak pemerintah. Pihak swasta mengembangkan lahan gambut untuk tanaman perkebunan, sedangkan pihak pemerintah dimulai dengan program transmigrasi melalui Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) pada lahan pasang surut di Pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Proyek ini mengalami kegagalan karena pengaturan air tidak dapat dilakukan pada seluruh areal sebagai akibat dari adanya keterbatasan topografi.

Di tahun 2015, Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan salah satu Provinsi yang terdampak kebakaran yang cukup parah, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dikarenakan fenomena alam El-Nino yang mengakibatkan musim kemarau yang panjang yang menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penyebab lain adalah kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan monokultur berskala industri yang masif, eksploitatif, dan penuh kanal yang akibatnya rentan kekeringan. Pemanfaatan yang mengabaikan sifat alamiah lahan gambut akan membuat gambut kering dan sangat mudah terbakar.

Tercatat Luas areal hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terbakar dari digitasi Citra Satelit Landsat 8 Oli sampai dengan 21 Oktober 2015 seluas 351.446 Ha dengan rincian lahan gambut : 211.970 Ha (60,31 %) dan lahan non gambut : 139,476 Ha (39,69 %) dari luas wilayah hutan seluas 3.487.468,40 Ha. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan 2 juta Ha lahan gambut yang akan direstorasi sampai dengan tahun 2020, dan Sumatera Selatan mendapat target





restorasi sebesar 615.907,49 ha dari sekitar 1.4 juta ha luas gambut di Sumatera Selatan.

Di tahun 2017 ini juga BRG memprioritaskan kegiatan restorasi gambut di 9 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yakni di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur, KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Lalan - Sungai Merang/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Merang- Sungai Ngirawan, KHG Sungai Ngirawan- Sungai Sembilang, KHG Sungai Saleh- Sungai Sugihan, KHG Sei Lalan- Sungai Bentayan, KHG Sungai Bentayan-Sungai Penimpahan, dan KHG Sungai Penimpahan-Sungai Air Hitam. Prioritas utama yaitu KHG di 3 Kabupaten yakni Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Target dimaksud di atas perlu dilakukan secara simultan, berkesinambungan dan melibatkan berbagai stakeholders terkait.

3. Meningkatnya Timbulan Sampah di Perkotaan

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 8.182.597 jiwa meningkat dari jumlah penduduk tahun 2016 yang tercatat 8.146.207 Jiwa dan tahun 2015 yang tercatat 7.456.098, Jumlah penduduk di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tersebar tidak merata. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu Kota Palembang sebanyak 1.573.898 jiwa dan Kota Pagaralam sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 141.500 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh faktor Kelahiran, Kematian dan Migrasi Penduduk, begitu juga halnya dengan Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 12,445 % juga dipengaruhi oleh peningkatan angka Kelahiran, Kematian dan Migrasi. Namun pengaruh paling besar pada Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 ini adalah karena faktor migrasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tingkat Pertumbuhan





1,175%. Sedangkan Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah di Provinsi Sumatera selatan sebesar 0,333 %. Sementara Gambar 3.45. menggambarkan perbandingan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2014-2017 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan 92.289,31 km², tingkat Kepadatan penduduk Provinsi Sumatera tertinggi adalah kota Palembang sebesar 4.263 dari total tingkat kepadatan penduduk di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan tingkat Kepadatan penduduk terendah adalah Kab Musi Rawas Utara

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perkotaan. Semakin tinggi jumlah penduduk dan beragam aktivitasnya, maka semakin meningkat pula timbulan dan variasi sampah yang dihasilkan. Akibatnya perlu biaya yang semakin besar dan lahan yang luas untuk menangani permasalahan sampah tersebut. Keterbatasan biaya dan lahan menimbulkan masalah tidak terkelolanya sampah dengan cara pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akibat minimnya armada yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Timbulan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh kota Palembang yaitu sebesar 680 Ton/Hari. Begitu juga dengan kabupaten/Kota yang menghasilkan timbulan sampah paling sedikit yaitu Empat Lawang sebesar 4,73 ton/Hari.

Bila dibandingkan dengan data tahun 2014 dan 2015, jumlah timbulan rata-rata per penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sama dengan jumlah timbulan rata-rata per penduduk pada tahun 2016. Jumlah timbulan rata-rata per Kabupaten/Kota pun tidak jauh berbeda. Namun jumlah timbulan secara keseluruhan mengalami Peningkatan

4. Penurunan Kualitas Air

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik





untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, dan sebagainya.

Belakangan ini kita sering mendengar sungai-sungai penting terutama sungai-sungai yang berada di wilayah perkotaan mengalami pendangkalan dan bahkan kering. Revolusi industri dan membaiknya tingkat kesehatan menyebabkan populasi manusia berkembang dengan sangat cepat dan ini mengakibatkan tekanan yang lebih besar terhadap lingkungan, termasuk lingkungan sungai dan daerah tangkapannya. Sejalan dengan itu, peran sungai bertambah satu lagi, yaitu menjadi penampung limbah industri maupun domestik. Masalahnya setiap sungai memiliki batas maksimum daya tampung lingkungan. Apabila daya tampung tersebut terlampaui, maka sungai akan kehilangan fungsi sebagaimana mestinya. Padahal kita tahu berbagai bencana lingkungan selalu erat kaitannya dengan menurunnya fungsi sungai dan daerah tangkapannya.

Sungai memiliki batas daya dukung dan daya tampung, apabila keduanya terlampaui maka akan terjadi penurunan kemampuan sungai dalam menjalankan fungsi ekologisnya. Beberapa dekade belakangan ini tekanan terhadap sungai semakin berat saja. Bertambahnya tekanan terhadap sungai nampaknya erat kaitannya dengan penambahan penduduk dan tekanan ekonomi. Upaya-upaya pengejaran terhadap perbaikan ekonomi baik perorangan maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan daya tampung sungai. Sebut saja konversi hutan di kawasan tangkapan air menjadi areal budidaya akan secara perlahan tapi pasti menurunkan debit aliran dasar (*baseflow*) yang menjamin sungai tetap mengalir walaupun tidak terdapat hujan. Apa jadinya lingkungan hidup kita jika sungai-sungai yang kita banggakan mulai mengering.

Persoalan tersebut sebenarnya berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung sungai. Pada saat merencanakan pemanfaatan ruang atau lahan seharusnya dihitung besarnya *daya tampung dan daya dukung lingkungan* Daerah Aliran Sungai (DAS).

Manusia pada hakekatnya tidak akan bertahan hidup tanpa kehadiran air, sebagai makhluk yang berakal, manusia mempunyai kemampuan untuk memilih





tempat tinggal dan beraktivitas yang tidak jauh dari sumber air, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk koloni di berbagai kawasan yang letaknya tidak jauh dari sungai. Fenomena perilaku manusia dalam memilih tempat tinggal dan beraktivitas dapat dilihat dari berbagai pengalaman sejarah masa lalu baik pada zaman prasejarah maupun pada era kerajaan serta lingkungan modern pada saat ini. Itu pulalah lingkungan sungai menjadi pusat aktivitas.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran (polusi) lingkungan hidup setelah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan hidup turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini disebabkan antara lain oleh usaha/kegiatan industri minyak dan gas bumi, pertambangan industri kimia, pariwisata dan usaha/kegiatan lainnya serta aktivitas kegiatan manusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka setiap sungai terlebih dahulu ditetapkan kelas airnya, pada pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tersebut sudah diadopsi dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku mutu Air Sungai, Klasifikasi Mutu Air.

Setiap sungai memiliki batas kemampuan *self purification*, oleh sebab itu setiap sungai di Provinsi Sumatera Selatan perlu dihitung daya tampungnya terhadap beban limbah, kalau penentuan kelas air bermanfaat sebagai acuan dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan air, maka daya tampung sangat berkaitan dengan kemampuan sungai dalam menanggung beban pencemar yang masuk ke dalamnya misalnya saja suatu aktivitas atau industri yang membuang limbah ke sungai sudah sesuai dengan baku mutu, namun karena limbah yang di buang ke sungai melebihi kapasitas daya tampungnya, maka belum tentu sungai yang di buang limbah tersebut tidak tercemar, ditambah lagi dengan banyaknya pemukiman yang di dirikan di daerah sempadan sungai jelas akan





membebani sungai dengan sampah dan limbah domestik yang langsung dibuang ke sungai, disinilah perhitungan daya tampung diperlukan.

Sungai di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 (satu) Induk sungai yaitu Sungai Musi dan terdapat 9 sungai besar yaitu sepanjang ± 750 km yaitu sungai Komering, Sungai Kelingi, Sungai Semangus, Sungai Lakitan, Sungai rawas, Sungai Batanghari Leko, Sungai lematang, Sungai Ogan dan Sungai Musi. Daerah Aliran Sungai Musi terdairi dari 11 Sub DAS yaitu Komering, Ogan, lematang, Musi Hulu, Kelingi, Kikim, Semangus, Rawas, Lakitan, Batanghari Leko, Musi Hilir dengan Debit 2.700-4000 m³/detik. Aktivitas yang ada di Daerah Aliran Sungai Musi yaitu pembukaan kawasan hutan, peladang berpindah, perkebunan, pertanian, pertambangan, perluasan kota, transmigrasi dan pertambangan industri.

Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mengetahui keadaan suatu perairan seperti untuk menentukan status dari kualitas air suatu badan air, merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar perairan, memberi masukan bagi pengambil keputusan dan merupakan peringatan dalam terjadinya kasus pencemaran. Sumber pencemaran antara lain berasal dari aktivitas usaha/kegiatan antara lain sektor, industri, pengolahan minyak bumi dan gas, pengolaan karet, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya. Sumber polutan air dapat juga berasal dari peristiwa yang bersifat alami dan/atau dari kegiatan manusia baik langsung atau tidak langsung sehingga akan mencemari lingkungan perairan sungai, danau dan laut dengan demikian pemantauan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu yang menyebabkan kualitas air sungai menurun antara lain:

- a) Kerusakan yang dapat diidentifikasi antara lain erosi dibagian hulu
- b) Berkurangnya vegetasi di bantaran sungai yang menyebabkan erosi tebing sungai
- c) Berkurangnya fungsi hidro-orografi hutan yang dicirikan banjir dimusim penghujan dan kekeringan dimusim kemarau
- d) Pencemaran air sungai oleh limbah indusrti pertanian (pestisida), penambangan dan limbah domestik





e) Berkurangnya biodiversitas perairan.

Kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Selatan dapat diketahui melalui pemantauan, pada 72 titik pantau di 16 kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Pemantauan kualitas air sungai dengan 23 (dua puluh tiga) parameter dan air sumur dengan 12 (dua belas) parameter, kemudian data pemantauan dianalisis menggunakan metode storet sehingga status mutu air dapat dievaluasi dalam skala penilaian.

- Status baik sekali dengan nilai 0 memenuhi baku mutu lingkungan.
- Status baik dengan nilai -1 sampai dengan -10 tercemar ringan.
- Status sedang dengan nilai -11 sampai dengan -30 tercemar sedang.
- Status buruk dengan nilai -31 ke atas Tercemar Berat.

Hasil pemantauan kualitas air memberikan kesimpulan atas status mutu air. Status mutu air berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu :

1. Kelas A : Baik Sekali artinya Memenuhi Baku Mutu
2. Kelas B : Baik artinya Cemar Ringan
3. Kelas C : Sedang artinya Cemar Sedang
4. Kelas D : Buruk artinya Cemar Berat

Semua parameter yang mengalami degradasi nilai dari Baku mutu Kualitas Air bisa disebabkan oleh masih besarnya limbah rumah tangga/domestik yang dibuang langsung ke sungai, ditambah lagi proses kegiatan mencuci ternak, hasil pertanian, hasil perkebunan, kegiatan keramba ikan, yang masih menjadi kebiasaan masyarakat yang belum berubah. Dan sebagian kecil ada lokasi titik pantau dimana di daerah tersebut banyak ditemukan kegiatan tambang galian c di sepanjang sungai, kemudian di tambah lagi banyak perkebunan-perkebunan berskala besar ada di daerah tersebut. Pada umumnya secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pemantauan dan perolehan status mutu air berdasarkan analisis storet tahun 2017 sebagai berikut :





- a. Kondisi status mutu air dengan kisaran skor -1 s/d -10 (Cemar ringan) terdapat pada 2 (dua) titik yaitu *Muara Rawas/ S. Kelingi, Tebing Tinggi dan Tanjung Raja*
- b. Kondisi status mutu air dengan kisaran Skor -11 s/d -30 (Cemar sedang) = 12 titik dengan lokasi sebagai berikut, *Kertapati, Desa Puser, Desa Peninjauan, Kota Batu, Banding Agung, Muara Dua, Rantau Nipis, Martapura, Gunung Batu, Terawas/Lakitan Hulu, Muara Kelingi, dan Sungai Kelingi Kota Lubuklinggau.*
- c. Kondisi status mutu air dengan skor lebih besar dari -30 (Cemar Berat) = 59 titik dengan lokasi sebagai berikut *Pulokerto, Muara Keramasan, Intake PDAM, Jembatan Ampera, Plaju Sungai Gerong, Sungai Dua, Muara Kumbang, Selat Borang, Pulau Burung, Desa Upang, Muara Tebing, Tanjung Buyut, Rantau Bayur, Teluk/Batang Hari Leko, Jembatan Sekayu, Muara Burnai, Pedamaran, Kayu Agung, Terusan Sigonang, SP. Padang, Indralaya, Tanjung Raja, Pemulutan, Keramasan Rambutan Kertamulya, Lengkayap, Rasuan, Cempaka, Indramayu, Darmo, PLTU, Jembatan Enim II, Tanjung Priok, Gunung Megang, Tebat Agung, Teluk Lubuk Lematang, Banuayu Lematang, Sukamerindu, Prabumulih Timur/Kelekar, Tanjung Rambang, Jembatan Kebur, Muara Lawai, Sukarame, Bunga Mas, Tanjung Aur, Tanjung Mulak, Pulau Pinang, Sukajadi, Semangus, Muara Lakitan, Muara Tiku, Norman, Muara Rupit/Rupit, Muara Rupit/Rawas, Karang Jaya, Muara Beliti, Kota Lubuklinggau/ Sungai Maluh.*

5. Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesia harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi





domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok ke pasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor ke berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (*BP Statistical Review of world energy 2014*). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestik ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energy primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro. Potensi energy primer di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.

Batubara adalah sumber energy terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan cadangan sebesar 24,24 miliar ton atau 48,85 persen dari cadangan nasional yang sebesar 57,84 miliar ton, secara umum batubara di Sumatera Selatan berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 kcal/kg.





Potensi CBM Sumatera Selatan tercatat sebesar 183 TCF atau 39 persen dari total potensi CBM Nasional, sedangkan potensi panas bumi sebesar 1.911 Mwe yang tersebar di Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Muara Enim.

B. Inovasi

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lingkungan maupun membuat inovasi-inovasi daerah seperti :

1. **Inovasi Kemitraan Regional Sumsel Dalam Pengelolaan Landscape/Restorasi Lahan Gambut meliputi :**
 - a. Kemitraan Dalam Pembangunan Lingkungan berbasis *landscape*
 - b. Kemitraan Dalam Penanggulangan Karhutla Dan Restorasi Gambut Dengan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Inovasi Kemitraan Global Dalam Pengelolaan Landscape / Restorasi Lahan Gambut
 - d. Kemitraan Inovatif Untuk Pengelolaan Lanskap Keberlanjutan Melalui Program Percepatan pelaksanaan pembangunan hijau (Green Growth)
2. **Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang Terkreditasi dengan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)**

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa analisa laboratorium lingkungan, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Visi sebagai berikut: **”Menjadi Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Kualitas Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan yang Berkualitas, Terpercaya dan Independen”** Maksud dari visi UPTD Laboratorium Lingkungan tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. **Berkualitas**, UPTD Laboratorium Lingkungan berupaya memenuhi kebutuhan sarana maupun prasarana agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. **Terpercaya**, UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki SDM yang memiliki sertifikat Profesi sesuai bidangnya. Demi peningkatan Kualitas SDM dan Profesionalisme maka UPTD





Laboratorium Lingkungan memberikan kesempatan kepada SDM untuk mengikuti berbagai pelatihan teknis dan manajemen. Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan dapat memberikan hasil pelayanan jasa laboratorium lingkungan yang dapat diandalkan keakuratannya *Independen*, UPTD Laboratorium Lingkungan dalam memberikan jasa pelayanan laboratorium lingkungan bersikap independen, bebas dari pengaruh kepentingan dari pihak manapun.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari Visinya, yaitu :

- a. Menerapkan cara berlaboratorium yang baik dan benar dan sistem manajemen mutu yang sesuai ISO / IEC 17025 : 2005
- b. Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yang berbasis kompetensi, profesional, dengan menggunakan standar yang diakui nasional, regional maupun internasional untuk mencapai kepuasan pengguna jasa.
- c. Menghasilkan data pengujian yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya.

3. Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan 2017 - 2030

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengambil peranan terdepan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang bertumpu pada sektor berbasis lahan seperti pertanian, agroforestri, kehutanan beserta seluruh turunannya. Pada tahun 2014, kontribusi sektor berbasis lahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 17,28% dan telah menopang kehidupan 1,33 juta rumah tangga. Prinsip tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Prinsip ini hanya bisa diwujudkan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, pemerhati konservasi dan masyarakat sipil. Tersedianya rencana induk yang mencakup pendekatan, strategi dan Peta Jalan untuk mencapai





Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode
2017-2030.

